



# Lurah dan Camat Dapat UPS Rp 256,86 M

## Palmerah, Warta Kota

Lokasi yang menjadi sasaran pengadaan *uninterruptible power system* (UPS) bukan hanya sekolah, melainkan juga 55 kelurahan dan delapan kantor kecamatan. Semuanya ada di Jakarta Barat.

Data itu ada dalam RAPBD DKI versi DPRD DKI, di mana terdapat data Belanja Langsung Hasil Pembahasan Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Alokasi anggaran untuk pengadaan UPS di setiap kelurahan dan kecamatan mencapai Rp 4,220 miliar. Artinya, total alokasi dana UPS itu mencapai Rp 265,860 miliar.

Delapan kecamatan itu adalah Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Tambora.

Sementara beberapa kelurahan yang akan mendapat UPS adalah Jembatan Lima, Jembatan Besi, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kepa, Duri Kosambi, Duri Selatan, Duri Utara, Glodok, Grogol, Jati Pulo, Jelambar, dan Jelambar Baru.

Anggaran itu berbanding terbalik dengan anggaran pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Anggaran untuk tempat tinggal yang difokuskan pada warga relokasi itu, justru banyak yang dipotong dan dihapus.

Seperti Rusunawa Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Pemprov DKI menganggarkannya Rp 70 miliar. Namun, DPRD mengurangnya Rp 40 miliar.

Lalu Rusunawa di Jalan Bekasi KM2 Jakarta Timur, dari anggaran Rp 60 miliar, dikurangi Rp 35 miliar. Lalu pembebasan lahan rusunawa Pulo Jahe, Jatinegara, Cakung, Rp 38,1 miliar dihapuskan.

Menanggapi adanya daftar nama kelurahan dan kecamatan yang dapat jatah UPS, Lurah Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Ahmad Khambali, mengatakan,

lebih baik beli genset yang lebih murah," katanya.

Sedangkan, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, M. Syarif, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui pengadaan UPS tersebut. "Saya nggak tahu itu ya, saya jawab belum tahu itu, karena kan ribuan ya itemnya," kata Syarif kepada *Warta Kota*, Minggu (1/3).

Menurut Syarif data tersebut seharusnya bisa dikomparasi atau dibandingkan dengan data yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok.

Apalagi, saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Ahok membicarakan masalah pengadaan UPS itu.

"Saya melihatnya itu (UPS) memang belum dibutuhkan ya dan memang kemahalan. Masak kelurahan pakai UPS," katanya seraya menambahkan, Ahok melaporkan temuan "dana siluman" terkait UPS ke KPK sudah tepat.

## Dukungan Ahok

Minggu (1/3 pagi, lebih kurang 500 orang berbagai usia pria dan wanita- menggelar aksi mendukung Ahok di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD).

Massa tergabung dalam aksi "Teman Ahok". Mereka menyebarkan jargon "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Di antara seribuan orang itu terdapat puluhan wanita cantik.

Puluhan warga berbagai usia berkeliling sembari memakai topeng kertas wajah Ahok dan membawa poster dukungan kepada Ahok.

Mereka mulai berdatangan sejak pukul 07.00 itu memasang beberapa buah papan tulis berukuran 50 x 50 cm di tengah Bundaran HI dan depan Hotel Kempinski serta membagi-bagikan selebaran kepada warga yang datang.

Koordinator Gerakan 'Teman Ahok', Aditya Yogi Prabowo mengatakan, aksi itu mengatasna-

makan 'Teman Ahok'. Tujuannya agar warga turut serta dalam mengawasi dugaan korupsi dalam APBD.

## Tagihan Listrik Bengkak

Penggunaan UPS rupanya cukup membebani pihak sekolah dalam hal biaya tagihan listrik. Wakil Kepsek bidang Humas SMA N 78, Sumarna mengatakan, setelah penggunaan UPS tagihan listrik mencapai Rp 70 juta per bulan. Padahal, sebelum menggunakan UPS tagihan hanya Rp 60 juta per bulan.

Hal senada disampaikan Kepala Sekolah SMA N 112 Jakarta Barat, Saryono yang menuturkan pihaknya harus bayar listrik Rp 25 juta per bulan setelah memakai UPS. "Sebelumnya bayar kurang dari segitu," ucap Saryono.

Di Jakarta Selatan, Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah II, Budiana, dan Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah I Jakarta Selatan menegaskan tidak pernah mengajukan anggaran pengadaan UPS. Keduanya hanya menganggarkan rehab gedung sekolah. (suf/dwi/m1/bin/m3)